

## **BAGAIMANA PENGARUH PEMIMPIN WANITA DALAM MENENTUKAN ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PERLINDUNGAN SOSIAL, PENDIDIKAN DAN KESEHATAN?**

**Wuri Andari**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, Indonesia

Email : wuri.andari19@gmail.com

### **ABSTRAK**

Penelitian ini memperlihatkan pengaruh dari pemimpin wanita terhadap belanja daerah dalam menentukan jumlah alokasi anggaran dan realisasi anggaran belanja fungsi perlindungan sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia. Penelitian ini dilakukan menggunakan data panel tahun 2013-2020 dengan regresi *Ordinary Least Square* metode *fixed effect* untuk menentukan pengaruh kepemimpinan wanita. Hasil penelitian menemukan bahwa tidak ada perbedaan antara pemimpin wanita dan laki-laki dalam hal alokasi anggaran, namun pemimpin wanita berpengaruh merealisasikan anggaran yang lebih besar pada anggaran kesehatan. Untuk wilayah Sumatera pemimpin wanita merealisasikan anggaran pendidikan lebih besar. Di wilayah Jawa wanita merealisasikan anggaran pendidikan yang lebih kecil. Pada wilayah Kalimantan wanita merealisasikan anggaran sosial lebih sedikit namun merealisasikan anggaran kesehatan yang lebih besar. Sedangkan wilayah Indonesia Timur tidak ada pengaruh yang berbeda baik dari alokasi maupun realisasi anggaran. Hasil yang berbeda pada setiap wilayah yang disebabkan adanya perbedaan kondisi wilayah yang terjadi pada saat pelaksanaan anggaran.

Kata Kunci : Gender; Pemimpin; Pemimpin Wanita; Belanja Daerah; Alokasi; Realisasi

### **ABSTRACT**

*This study shows the influence of female leaders on regional spending in determining the amount of budget allocation and budget realization for social protection, education, and health functions at the district/city level in Indonesia. This research was conducted using panel data for 2013-2020 with the Ordinary Least Square regression fixed effect method to determine the influence of female leadership. The study found no difference between female and male leaders in budget allocation, but female leaders were influential in realizing larger budgets in the health budget. For Sumatra, women leaders realize a more extensive education budget. In Java, women realize a smaller education budget. In Kalimantan, women realize a smaller social budget but a larger health budget. Meanwhile, the effect on budget allocation and realization was the same for Eastern Indonesia. The different results in each region were caused by differences in regional conditions that occurred during budget execution.*

*Keywords : Gender; Leader; Female Lead; Regional Expenditure; Allocation; Realization*

## PENDAHULUAN

Sedikitnya wanita yang menjabat sebagai kepala daerah merupakan kondisi yang banyak terjadi tidak hanya di Indonesia namun di dunia. Setidaknya terdapat 8% wanita menjabat sebagai kepala daerah di Indonesia. Keterlibatan perempuan yang relatif terbatas dalam partisipasi politik adalah kendala yang disebabkan oleh persepsi masyarakat sendiri yang bias dalam membatasi pembagian peran perempuan dan laki-laki (Rahayu, 2014). Tidak hanya sebagai pemimpin daerah, dalam keseharian kemampuan perempuan dianggap hanya terbatas pada permasalahan rumah tangga yang terfokus mengatasi urusan perempuan dan anak-anak (Cerrato & Cifre, 2018; KemenkoPMK, 2019). Tidak sedikit yang beranggapan jika kemampuan seseorang dalam memimpin disandingkan dengan aspek biologis yang melekat pada pemimpin tersebut yaitu adanya perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan (Sasmita & As'ad Raihan, 2017). Kondisi ini menjadi kendala wanita untuk turut serta berperan sebagai pengambil keputusan dan pemimpin. Dalam kepemimpinan dan wewenang sebagai pembuat kebijakan, para pimpinan dan politisi akan menggunakan sejumlah anggaran sebagai alat penentuan kebijakan (Holman, 2014). Anggaran yang sesuai sangat dibutuhkan dalam mencapai tujuan kebijakan, nyatanya anggaran setiap daerah terbatas dengan jumlah anggaran daerah yang tersedia. Funk & Philips (2018) mengungkapkan adanya keterbatasan anggaran menjadi kendala dalam pelaksanaan program sehingga dalam pelaksanaannya dibentuk program prioritas dengan alokasi yang lebih besar dibandingkan porsi lainnya.

Penelitian terdahulu telah mempelajari adanya perbedaan keputusan yang diambil antara pemimpin wanita dengan laki-laki. Di India ditemukan bahwa perempuan yang menjabat sebagai pemimpin daerah mengantisipasi biaya ekonomi yang lebih rendah dibandingkan dengan pemimpin laki-laki namun mengalokasikan banyak anggaran untuk air minum dan program yang berkaitan dengan peran tradisional wanita seperti Pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial (Chattopadhyay & Duflo, 2004; Clots-Figueras, 2011). Sedangkan di Amerika Serikat dan India bagian lainnya pemimpin perempuan menganggarkan lebih banyak untuk layanan kesehatan dan kesejahteraan sosial (Clots-Figueras, 2011; Holman, 2014). Penelitian serupa di Indonesia masih sangat minim pembahasan maupun penelitian yang mengangkat pengaruh pemimpin perempuan dengan anggaran daerah, namun Suci et al. (2020)

melakukan penelitian dengan hasil bahwa perempuan di tingkat DPRD memiliki pengaruh positif dalam meningkatkan anggaran lingkungan. Adanya perbedaan hasil di beberapa negara mendorong penulis pada penelitian ini untuk membahas mengenai pengaruh pemimpin wanita terhadap alokasi dan realisasi anggaran daerah khususnya terkait anggaran perlindungan sosial, kesehatan, dan pendidikan yang banyak ditemukan perbedaan di beberapa negara.

Anggaran perlindungan sosial, pendidikan dan kesehatan merupakan anggaran layanan pokok pemerintah dimana penggunaan anggaran tersebut telah memiliki aturan tertentu yang tertuang dalam undang-undang yang juga disebut sebagai *mandatory spending* seperti anggaran Pendidikan, menurut UUD 1945 pasal 31 ayat 4 bahwa anggaran untuk Pendidikan ditetapkan minimum 20% baik dari APBN maupun APBD. Sedangkan untuk anggaran kesehatan disetiap kabupaten/kota menurut UU Nomor 36 tahun 2019 mengenai kesehatan ditetapkan sebesar 10% dari total APBD dan 5% dari APBN. Sedangkan pada perlindungan sosial meliputi anggaran jaminan sosial untuk kesehatan serta bantuan sosial yang berasal dari APBN.

Dengan adanya aturan tersebut maka setiap pemimpin wajib mengikuti dan menjalankan penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun pada realisasi anggaran masih ada beberapa daerah yang tidak mengindahkan ketentuan tersebut. Hal ini dapat terjadi karena alokasi anggaran yang disusun satu tahun sebelum anggaran berjalan disesuaikan dengan refleksi dan pencapaian tahun sebelumnya. Refleksi anggaran dapat menyebabkan peningkatan dan penurunan jumlah anggaran yang akan dialokasikan untuk kesuksesan tujuan kesejahteraan. Peningkatan dan penurunan anggaran yang mungkin terjadi memunculkan pertanyaan bagaimana pengaruhnya terhadap pertumbuhan kesejahteraan pada masing-masing Kabupaten/Kota di Indonesia,

Penelitian ini akan memberikan penjelasan pengaruh pemimpin wanita terhadap alokasi dan realisasi anggaran belanja perlindungan sosial, pendidikan dan kesehatan. Serta rekomendasi kebijakan bagi pemimpin daerah dan cara pandang masyarakat terhadap keterlibatan wanita di dunia politik.

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari kepemimpinan wanita terhadap alokasi dan realisasi belanja daerah perlindungan sosial, pendidikan dan

kesehatan di tingkat kabupaten/kota di Indonesia. Untuk mengetahui hubungan keduanya maka akan dilakukan penelitian dengan menggunakan deskriptif kuantitatif, metode deskriptif kuantitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran tentang situasi atau kejadian, sehingga hanya mengumpulkan data dasar (Afgani *et al.*, 2021; Rivanda *et al.*, 2021), data panel yaitu melihat seberapa besar pengaruhnya terhadap alokasi anggaran daerah.

Uji data panel dilakukan untuk emnentukan metode terbaik yang digunakan untuk melakukan penelitian. Metode yang diuji antara lain OLS (*Ordinary Least Square*), FE (*Fixed Effect*) dan RE (*Random Effect*). Dimana OLS memiliki kegunaan secara sederhana untuk menggabungkan dua jenis data *cross section dan time series*; FE yaitu medode panel data yang digunakan dengan menambahkan *dummy* untuk meminimalisir adanya OVB (*omitted variables bias*) serta memberikan perubahan *intercept*; sedangkan RE adalah dari estimasi *Generalized Least Square* untuk memperbaiki efisiensi proses *least square* dengan memperhitungkan eror dari *cross-section dan time series* (GLS) (Ajija *et al.*, 2010; Vinky, 2020; Rivanda *et al.*, 2022).

Sumber data dalam penelitian ini diakses melalui Direktorat Jenderal Perimbangan dan Keuangan, Kementerian Keuangan untuk melihat alokasi belanja periode 2013-2020, data dari Komisi Pemilihan Umum untuk melihat hasil pilkada dan latar belakang pemimpin terpilih serta data dari BPS untuk melihat jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, PDRB serta luas wilayah.

Variabel dependent berupa persentase alokasi anggaran diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan dan Keuangan, Kementerian Keuangan untuk melihat alokasi belanja periode 2013-2020 . anggaran yang difokuskan penelitian ini yaitu terkait sector sosial diantaranya Fungsi anggaran perlindungan sosial, kesehatan dan pendidikan. Data tersebut akan digunakan sebagai bahan penilitian terhadap kaitannya dengan kepemimpinan perempuan. Penelitian ini menggunakan data panel dari 514 kabupaten/kota di Indonesia antara tahun 2013-2020. Rentang tahun ini digunakan karena adanya periode Pilkada serentak pada tahun 2015, 2017 dan 2018.

Persamaan atau model dasar regresi yang digunakan untuk mendapatkan hasil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Budget Alokasi}_{it} = \alpha_i + \beta_1 \text{Female}_{it} + \beta_2 \text{Kemiskinan}_{it} + \beta_3 \text{PDRB}_{it} + \beta_4 \text{Populasi}_{it} + \beta_5 \text{Luas}_{it} + \beta_6 \text{Female} \times \text{Twoperiods}_{it} + \beta_7 \text{age}_{it} + \theta_i + \tau_i + \varepsilon_{it} \dots \dots \dots (1)$$

$$\text{Budget Realisasi}_{it} = \alpha_i + \beta_1 \text{Female}_{it} + \beta_2 \text{Kemiskinan}_{it} + \beta_3 \text{PDRB}_{it} + \beta_4 \text{Populasi}_{it} + \beta_5 \text{Luas}_{it} + \beta_6 \text{Female} \times \text{Twoperiods}_{it} + \beta_7 \text{age}_{it} + \theta_i + \tau_t + \varepsilon_{it} \dots \dots \dots (2)$$

Pengaruh pemimpin wanita terhadap alokasi anggaran belanja dijelaskan menggunakan model (1), sedangkan pengaruh pemimpin wanita terhadap realisasi anggaran belanja dijelaskan dengan model (2). Penelitian dilakukan di Indonesia (i) pada level kabupaten/kota dan rentang waktu penelitian 2013-2020 (t). pada model penelitian juga menambahkan interaksi variabel dan variabel kontrol maupun fixed effect pada level kabupaten/kota ( $\theta_i$ ), tahun ( $\tau_t$ ) dan error term ( $\varepsilon_{it}$ ).

Selain kedua variabel tersebut, digunakan beberapa variabel kontrol yang mungkin dapat mempengaruhi keputusan kepemimpinan perempuan dalam menentukan penggunaan belanja daerah diantaranya: Kemiskinan adalah persentase tingkat kemiskinan; PDRB yaitu total pertambahan nilai atas barang dan jasa dalam satu tahun; *Populasi* merupakan jumlah penduduk yang ada di kabupaten; Luas adalah luas wilayah kabupaten; *Age* adalah usia kepala daerah dan *Female x Twoperiods* merupakan interaksi antara pemimpin perempuan dengan terpilihnya menjadi pemimpin kembali di periode berikutnya.

Variabel yang digunakan sebagai kontrol dalam penelitian ini dipilih karena adanya pengaruh secara langsung yang dapat mempengaruhi keputusan pemimpin daerah dalam menentukan besarnya anggaran yang akan digunakan dalam periode kepemimpinan tersebut. Variabel yang digunakan yaitu demografi daerah serta latar belakang pemimpin daerah.

Besarnya jumlah anggaran dapat dipengaruhi oleh populasi, tingkat kemiskinan, jumlah PDRB dan luasan wilayah. Dimana populasi dan tingkat kemiskinan yang saling berhubungan dapat mempengaruhi besarnya persentasi anggaran konteks sosial. Tingginya jumlah populasi maupun tingkat kemiskinan tentu menyebabkan pemerintah akan menganggarkan sejumlah anggaran yang lebih besar. Tingkat kemiskinan menggambarkan persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan serta sulit mendapatkan standar kehidupan yang layak. Tingkat kemiskinan sendiri tercermin dari jumlah seluruh penduduk yang ada di wilayah tersebut. Sehingga variabel ini cocok untuk digunakan sebagai tolak ukur dalam menentukan besarnya jumlah anggaran untuk

tujuan kesejahteraan melalui anggaran belanja daerah (Suci et al., 2020; Svaleryd, 2009; Vinky, 2020) terutama pada biaya perlindungan sosial, pendidikan maupun kesehatan.

Sementara itu, besarnya PDRB menggambarkan pertumbuhan ekonomi yang terjadi dari tahun ke tahun. Semakin besar pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan daerah sekaligus meningkatkan belanja daerah (Larengkum, 2012). Penggunaan variabel luas daerah juga di gunakan sebagai pertimbangan pemerataan persebaran penduduk, dimana ini akan meningkatkan beban penduduk produktif dalam membiayai penduduk tidak produktif (Kemenkes, 2019).

**Pada Tabel 1**, dari segi latar belakang pemimpin daerah berupa usia pemimpin dan adanya kepemimpinan selama dua periode dianggap memiliki hubungan dalam penentuan besarnya anggaran yang akan digunakan dalam periode kepemimpinan. Hal ini karena adanya kepemimpinan selama dua periode akan memberikan efek penilaian terhadap kabupaten/kota yang telah dipimpinnya lebih jelas. Penilaian ini didasarkan adanya pemahaman mengenai kondisi kabupaten/kota yang lebih baik dengan adanya kepemimpinan selama dua periode sehingga program kerja dan tujuan dapat tercapai.

Ringkasan data yang digunakan untuk menjelaskan pengaruh dari pemimpin wanita ditampilkan dalam statistic deskriptif dari masing-masing kabupaten/kota di Indonesia tertera pada tabel 1 yaitu sebanyak 4112 data observasi dari 514 kabupaten/kota pada rentang waktu penelitian tahun 2013 hingga tahun 2020. Jika dilihat dari latar belakang kepala daerah dari segi usia kepala daerah tercatat paling muda di usia 25 tahun dan tertua di usia 79, namun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota batas minimum untuk kepala daerah yaitu 30 tahun dan 25 tahun untuk wakilnya, dimana bupati termuda tersebut berasal dari Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat di tahun 2016. Sedangkan untuk kepala daerah wanita yang terpilih kembali dalam 2 periode hanya sekitar 3% dari keseluruhan wanita terpilih. Meskipun terdapat kepala daerah yang memiliki usia dibawah batas dari yang telah ditentukan, kondisi ini terjadi karena beliau memimpin sebagai kepala daerah menggantikan kepala daerah sebelumnya sebelum masa jabatan terselesaikan.

Melihat statistika dari segi wilayah kabupaten, luas wilayah terluas ada pada 90.35rb ha yang berada pada kabupaten Pinrang, dengan jumlah penduduk terbanyak ada di kabupaten bogor dengan lnpopulasi sebesar 15.62 dan rata-rata lnpopulasi tiap

kabupaten adalah sejumlah 12.475. Sedangkan untuk tingkat kemiskinan tertinggi sebesar 44.75% di Kabupaten Deiyai, Papua pada tahun 2013 dan rata-rata tingkat kemiskinan ada di angka 12.47%. Pada rentang waktu penelitian jumlah observasi untuk kepala daerah yang menjabat selama dua periode adalah sebanyak 1372 data, sedangkan pemimpin wanita yang menjabat selama dua periode terdapat 129 observasi. Wilayah Jawa menduduki jumlah observasi pemimpin wanita dengan masa jabatan dua periode terbanyak yaitu 34 observasi dan wilayah Kalimantan merupakan wilayah dengan jumlah observasi pemimpin wanita dua periode sebanyak 6 observasi.

Untuk keseluruhan data penelitian selama 8 tahun waktu penelitian terdapat 381 orang wanita yang menjabat sebagai kepala daerah atau sekitar 9,27% dari keseluruhan data observasi yang ada. Jumlah wanita terbanyak berada pada wilayah Jawa yaitu sebanyak 178 wanita atau 18,49% dari seluruh observasi di wilayah Jawa dan 4,28% dari data nasional. Jumlah terendah yaitu pada wilayah Kalimantan yang terdiri dari 448 observasi yang terdiri dari 44 pemimpin wanita yaitu 9,82% wilayah Jawa dan 1,07% pemimpin perempuan di Indonesia. Sedangkan untuk wilayah Indonesia terdapat 103 observasi pemimpin wanita dari 1480 data yang ada dan 58 dari 1232 observasi pada wilayah Sumatera.

Selain descriptive statistic variabel kontrol di atas, terdapat pula Descriptive Statistics pada variabel dependent yang berupa persentase anggaran belanja daerah. Nilai persentase dari masing-masing fungsi juga terlihat pada tabel 1 berikut. Pada alokasi anggaran, sesuai dengan Undang-Undang yang ada bahwa alokasi untuk anggaran pendidikan menurut UUD 1945 pasal 31 serta UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa besarnya alokasi anggaran pendidikan ditentukan sebesar 20% dari APBD yang tersedia. Sedangkan pada anggaran kesehatan diatur sesuai UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yaitu sebesar 5% dari APBN dan 10% dari APBD. Meskipun beberapa daerah belum mengindahkan peraturan tersebut namun secara menyeluruh rata-rata penetapan alokasi anggaran dan realisasi anggaran sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dengan melakukan uji panel untuk menentukan penggunaan model terbaik antara OLS (*Ordinary Least Square*), FE (*Fixed Effect*) dan RE (*Random Effect*) diperoleh hasil bahwa model regresi yang tepat digunakan untuk penelitian ini yaitu

menggunakan model *Fix Effect*. Untuk melihat pengaruh dari kepemimpinan wanita terhadap penggunaan anggaran belanja daerah fungsi perlindungan sosial, pendidikan dan kesehatan dapat dilihat dari tabel hasil regresi **pada Tabel 2**. Hasil memperlihatkan regresi menggunakan model dasar pada alokasi serta realisasi anggaran.

Pada tabel 2 menjelaskan kolom (1) merupakan model dasar pengaruh pemimpin wanita terhadap alokasi dan realisasi anggaran tanpa adanya penggunaan kontrol variabel. Kolom (2) dilakukan dengan menambahkan kontrol demografi daerah berupa populasi, tingkat kemiskinan, PDRB dan luas wilayah. Sedangkan pada kolom (3) turut menambahkan kontrol berupa latar belakang pemimpin daerah. Dari tabel hasil penelitian diatas secara keseluruhan pemimpin wanita hanya berpengaruh terhadap peningkatan realisasi anggaran fungsi kesehatan. Sedangkan dari fungsi perlindungan sosial dan pendidikan baik dari segi alokasi maupun realisasi tidak menunjukkan hasil yang signifikan berbeda antara pemimpin wanita dengan pemimpin laki-laki. Sebelumnya menurut Little et al. (2001) anggaran pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial merupakan anggaran yang berkaitan dengan peran wanita sebagai pengasuh. Sehingga wanita cenderung meningkatkan anggaran tersebut.

Hasil ini juga sesuai dengan beberapa penelitian sebelumnya bahwa pemimpin perempuan cenderung meningkatkan anggaran untuk Kesehatan (Chattopadhyay & Duflo, 2004; Clots-Figueras, 2011) . Kesehatan juga merupakan bagian dari langkah awal menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Sehingga sebagai seorang wanita dan seorang ibu mereka sangat mementingkan kesehatan dibandingkan dengan fungsi lainnya. Selain itu tingkat kesehatan di Indonesia juga berada pada titik 101 dari 149 negara yang tertuang dalam publikasi *The Legatum Prosperity Index 2017* yang diukur melalui kesehatan fisik, mental, perawatan serta infrastruktur kesehatan untuk meminimalisir persebaran penyakit maupun wabah. Sehingga realisasi anggaran kesehatan patut untuk dipertimbangkan besarannya. Hal ini juga sesuai dengan hasil penelitian (Chattopadhyay & Duflo, 2004) yang menjelaskan bahwa ketika perempuan menjabat sebagai pembuat kebijakan, maka mereka akan berinvestasi lebih banyak pada infrastruktur serta anggaran yang berkaitan dengan peran wanita secara tradisional seperti keperluan rumah tangga dan kesehatan keluarga.

Funk & Philips (2018) sebelumnya menyatakan bahwa selain meningkatkan anggaran kesehatan pemimpin perempuan juga cenderung meningkatkan anggaran

pendidikan dan lingkungan. Namun pada penelitian di Indonesia ini mendapatkan hasil yang berbeda dimana baik pada alokasi maupun realisasi anggaran pemimpin wanita tidak secara signifikan mempengaruhi anggaran tersebut. Perbedaan yang terjadi antara alokasi anggaran dengan realisasi anggaran merupakan bukti adanya perubahan keputusan yang terjadi selama tahun berjalannya anggaran. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor kondisi lingkungan maupun adanya tragedi yang terjadi pada saat realisasi anggaran, seperti adanya bencana alam maupun adanya wabah yang menyerang. Namun biasanya alokasi anggaran di susun berdasarkan dengan apa yang telah dicapai pada tahun sebelumnya sebagai sebuah refleksi untuk merencanakan alokasi anggaran di tahun berikutnya. Sehingga jika pada realisasi terdapat perubahan anggaran maka dapat dikatakan bahwa hal tersebut merupakan sebuah insiden yang tidak dapat diprediksikan sebelumnya.

Faktor lain yang mungkin mempengaruhi hasil penelitian ini yaitu ketidaksesuaian penggunaan anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah dimana sesuai UUD 1945 pasal 31 ayat 4 bahwa anggaran untuk pendidikan ditetapkan minimum 20% baik dari APBN maupun APBD meskipun statistik data menampilkan rata-rata anggaran pendidikan sudah mencapai ketentuan, namun pada prakteknya masih terdapat daerah-daerah yang menetapkan anggaran pendidikan kurang dari 20% terutama untuk wilayah Indonesia bagian Timur sedangkan anggaran pendidikan terbesar ada pada pulau Jawa yang sesuai dengan jumlah penduduk yang sangat padat.

Hasil yang signifikan dari adanya realisasi yang lebih besar oleh pemimpin wanita telah dilakukan dengan menggunakan kontrol *time effect* dan *fix effect* sehingga hasil yang muncul telah menyamakan kondisi di setiap tahunnya. Hasil ini dapat menjelaskan sisi wanita sebagai seorang ibu yang turut memperhatikan kesehatan keluarga sebagai prioritas utama dalam menjalankan kehidupan. Sehingga pemimpin wanita cenderung akan merealisasikan anggaran yang mendukung kepentingan tersebut. Selain itu dari segi Indeks Kesehatan Global Indonesia memiliki skor 40,2 dari 100 skor kesehatan tentu kondisi ini berada di jauh dari kata baik. Kemudian BPS mencatat hingga tahun 2019 terjadi peningkatan keluhan Kesehatan mencapai 32,36% dan Indonesia merupakan peringkat 5 dunia negara dengan tingkat stunting tertinggi yaitu mencapai 30,8% di tahun 2018 dan masuk dalam posisi 2 tertinggi di Asia Tenggara. Keadaan kesehatan Indonesia dan naluri sosial wanita menjadi kombinasi yang

mendukung terjadinya realisasi anggaran kesehatan yang lebih tinggi saat wanita menjabat sebagai pemimpin daerah.

Untuk melihat lebih dekat dari berbagai wilayah di Indonesia, penulis membagi penelitian ini kedalam beberapa wilayah bagian diantaranya Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Indonesia Timur. Hal ini bertujuan untuk melihat apakah ada perbedaan yang sangat besar jika penelitian dilakukan terfokus di wilayah yang berbeda. **Pada Tabel 3**, di bawah menunjukkan hasil penelitian yang berbeda di beberapa wilayah Indonesia. Pada wilayah sumatera menunjukkan hasil yang konsisten bahwa pemimpin wanita berpengaruh meningkatkan anggaran pada fungsi pendidikan baik pada alokasi anggaran maupun realisasi anggaran. Terlihat jika pada alokasi anggaran, pemimpin wanita mengalokasikan anggaran pendidikan 3,53% lebih tinggi dibandingkan pemimpin laki-laki. Sedangkan pada realisasi anggaran, pemimpin wanita merealisasikan anggaran pendidikan 1,54% lebih tinggi dibandingkan dengan pemimpin laki-laki dengan tingkat signifikan sebesar 5 %.

Pada fungsi anggaran lainnya yaitu perlindungan sosial dan kesehatan untuk wilayah sumatera, pemimpin wanita tidak memiliki hasil yang signifikan mempengaruhi alokasi maupun realisasi anggaran yang ada. Hal ini juga dapat menjelaskan bahwa pemimpin wanita tidak memiliki pengaruh yang berbeda dengan pemimpin laki-laki terhadap anggaran perlindungan sosial dan kesehatan.

Hasil regresi yang dilakukan di wilayah Jawa menunjukkan hasil yang berbeda dengan wilayah sumatera dimana untuk wilayah jawa pemimpin wanita menganggarkan alokasi pendidikan yang lebih rendah dibandingkan dengan pemimpin laki-laki yaitu 2,42% lebih rendah meskipun dengan tingkat signifikan 10%. Pada realisasi anggaran pemimpin wanita di wilayah jawa juga menunjukkan hasil yang sama dengan tingkat signifikan 5% dimana pemimpin wanita cenderung merealisasikan anggaran pendidikan 1,07% lebih rendah dibandingkan pemimpin laki-laki. Sedangkan untuk anggaran perlindungan sosial dan kesehatan di wilayah jawa tidak ada pengaruh yang berbeda antara pemimpin laki-laki dengan pemimpin perempuan.

Perbedaan yang terjadi pada realisasi anggaran pendidikan ini tidak konsisten disetiap bagian penelitiannya sehingga sulit untuk menentukan pengaruh yang tepat dari adanya pemimpin wanita. Namun di beberapa negara yang berbeda juga menyebutkan hasil yang berbeda terhadap dari adanya pemimpin wanita di daerah tersebut. Penelitian

yang dilakukan Suci et al. (2020) menyebutkan bahwa pemimpin wanita mengalokasikan anggaran pendidikan lebih rendah. Namun Funk & Philips (2018) menemukan bahwa di Brazil, pemimpin wanita dapat meningkatkan anggaran pendidikan, selain itu Clots-Figueras (2011) India, juga menemukan bahwa pemimpin perempuan berinvestasi lebih banyak di bidang pendidikan dan kesehatan dibandingkan laki-laki. Dari perbedaan ini dapat dikatakan kondisi suatu negara/wilayah dapat memengaruhi pola pikir pemimpin daerah untuk menentukan kebijakan yang mereka ambil.

Dari grafik pendukung pada Gambar 1, diatas dapat menjelaskan hasil yang berbeda antara pendidikan di wilayah Sumatera dan di wilayah Jawa maupun bagian wilayah lainnya. Terlihat partisipasi sekolah tertinggi berada pada wilayah Sumatera kemudian di susul dengan wilayah Indonesia Timur, Jawa dan Kalimantan. Secara menyeluruh peningkatan partisipasi sekolah di setiap wilayah terjadi setiap tahun, namun dalam menyelesaikan pendidikan wilayah jawa menjadi daerah dengan tingkat persentase tertinggi mencapai 70%. Karena penyelesaian pendidikan yang tinggi tersebut maka dalam realisasinya pemimpin wanita di wilayah jawa menganggap pendidikan sebagai program yang telah tercapai dengan baik, sehingga anggaran yang digunakan lebih sedikit. Berbeda dengan wilayah sumatera yang memiliki partisipasi tinggi namun dalam penyelesaian masih berada di bawah wilayah jawa yaitu 65% dari 75% partisipasi sekolah. Hal ini membuat pemimpin wanita pada periode tersebut signifikan merealisasikan anggaran yang lebih besar di bidang . Dengan tujuan meningkatkan persentase kelulusan anak sekolah di tingkat SMA.

Pada wilayah Kalimantan, terlihat pada tabel 3 bahwa pemimpin wanita tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada alokasi anggaran baik untuk anggaran perlindungan sosial, maupun kesehatan. Sedangkan pada realisasi anggaran pemimpin perempuan cenderung merealisasikan anggaran sosial 0,13% lebih rendah dengan tingkat signifikan 10% dan merealisasikan anggaran kesehatan 1,56% lebih tinggi dibandingkan pemimpin laki-laki dengan tingkat signifikan 1%.

Pemimpin wanita di wilayah Kalimantan sangat memperhatikan anggaran untuk meningkatkan kesehatan masyarakat Kalimantan, namun cenderung mengurangi realisasi untuk penggunaan anggaran perlindungan sosial. Menurut publikasi Badan Pusat Statistik tahun 2020 mengenai persebaran porsi penduduk miskin selama kurun

waktu 2016-2019 wilayah Kalimantan memang menempati urutan penduduk miskin terendah yaitu rata-rata 3,7%. kondisi menyebabkan pemerintah Kalimantan menganggap bahwa kemampuan memenuhi kebutuhan pokok sudah banyak terpenuhi dan menyebabkan naluri pemimpin wanita untuk merealisasikan anggaran perlindungan sosial yang tidak lebih banyak. Hasil ini juga dijelaskan terkait realisasi anggaran kesehatan dapat terjadi sesuai dengan kondisi pada saat periode kepemimpinan tersebut hingga tahun 2020 di jelaskan oleh Kemendagri (2020) bahwa Kalimantan adalah wilayah dengan prevalensi stunting tertinggi yaitu 21,18% dengan provinsi Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat sebagai provinsi kedua dan ketiga prevelensi tertinggi di Indonesia. Selain itu Kalimantan masuk kedalam 12 daerah prioritas penanganan stunting 2024 sehingga pemimpin wanita yang menjabat saat itu memutuskan perlu adanya anggaran yang berlebih pada sector kesehatan.

Berbeda dengan ketiga wilayah sebelumnya yaitu Sumatera, Jawa dan Kalimantan. Pemimpin wanita di wilayah Indonesia timur tidak menunjukkan hasil yang signifikan untuk mempengaruhi anggaran baik alokasi amupun realisasi anggaran di wilayah tersebut. Ini menandakan bahwa tidak ada perbedaan antara pemimpin perempuan dan pemimpin laki-laki di wilayah Indonesia timur dalam menentukan penggunaan anggaran daerahnya. Penyebab lain tidak ditemukannya pengaruh yang berbeda juga mungkin karna masih ada beberapa variabel kontrol yang belum menangkap faktor lain yang ada di wilayah tersebut untuk menunjukkan adanya perbedaan dalam pengambilan keputusan.

Wilayah timur Indonesia sering dikatakan sebagai wilayah yang kurang tersentuh oleh kemajuan pemerintah nasional. Hal ini juga menyebabkan banyaknya daerah tertinggal di wilayah tersebut. Namun dari hasil penelitian menyatakan bahwa ada kemungkinan bahwa baik pemimpin wanita maupun laki-laki memiliki cara pandang yang sama dalam mensejahterakan masyarakat Indonesia timur. Sehingga hasil penelitian tidak menunjukkan adanya perbedaan dalam penggunaan anggaran wilayah tersebut.

Beberapa data pendukung seperti pada Gambar 1 juga menampilkan tingkat kelulusan terendah, kemudian kondisi kesehatan Indonesia Timur yang menjadi prioritas penurunan stunting nasional dan merupakan daerah terbanyak dalam 12 daerah prioritas termasuk Nusa Tenggara, Sulawesi dan Papua serta kondisi sosial yang jauh

dari strata Indonesia bagian Barat. Kondisi tersebut membuat pemimpin daerah baik wanita maupun laki-laki memiliki pola pemikiran yang sama dalam menentukan alokasi dan realisasi anggaran guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sehingga semua jenis anggaran menjadi sama kedudukannya dan tidak ada yang lebih prioritas karena semua diharuskan tumbuh secara Bersama.

Penggunaan model regresi dengan memecah Indonesia kedalam wilayah berbeda menunjukkan hasil yang berbeda karena adanya kondisi lapangan maupun kondisi wilayah yang berbeda. Namun secara keseluruhan memiliki hasil yang sama ini pada penentuan alokasi anggaran baik pemimpin laki-laki maupun pemimpin wanita tidak memiliki pengaruh yang berbeda. Hasil ini disebabkan adanya peraturan pemerintah pusat yang telah memberikan arahan kepada seluruh daerah melalui undang-undang dan peraturan lainnya dalam menentukan besaran minimum alokasi anggaran belanja daerah pada masing masing fungsi anggaran.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan adanya hubungan positif terhadap anggaran daerah terutama pada realisasi anggaran kesehatan. Secara umum pemimpin wanita akan merealisasikan anggaran kesehatan lebih tinggi dibandingkan pemimpin laki-laki dan tidak ada pengaruh yang berbeda antara pemimpin laki-laki dengan pemimpin wanita dalam penentuan besarnya alokasi anggaran untuk perlindungan sosial, dan kesehatan.

Jika dikelompokkan kedalam beberapa wilayah yaitu wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Indonesia Timur maka pemimpin wanita di wilayah sumatera akan menggunakan anggaran yang lebih besar di fungsi baik dalam alokasi maupun realisasi anggaran. Pada wilayah jawa memiliki hasil yang berkebalikan dimana pemimpin wanita cenderung merealisasikan anggaran yang lebih sedikit dibandingkan pemimpin laki-laki. Pada wilayah Kalimantan, pemimpin wanita merealisasikan anggaran sosial lebih sedikit serta merealisasikan anggaran kesehatan yang lebih besar dari pemimpin laki-laki. Sedangkan untuk wilayah Indonesia timur tidak ada pengaruh yang berbeda antara pemimpin laki-laki dengan pemimpin wanita karena adanya prioritas yang berbeda setiap daerah yang dipengaruhi oleh kondisi yang ada di masing-masing wilayah.

Tidak adanya perbedaan dalam penentuan besarnya alokasi anggaran antara pemimpin wanita dan pemimpin laki-laki menunjukkan hal yang positif bahwa pemimpin wanita juga pantas menduduki kursi pemimpin. Pola pikir yang cenderung sama ini menyatakan bahwa tidak ada yang berbeda serta tidak membuktikan bahwa pemimpin laki-laki jauh lebih baik dari pemimpin wanita. Selain itu penetapan alokasi anggaran pada fungsi perlindungan sosial, dan kesehatan telah diatur dalam undang-undang dengan batas minimum penggunaan anggaran. Sedangkan besar kecilnya realisasi anggaran lebih disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terjadi saat tahun berjalan.

Hasil penelitian terkait pengaruh dari pemimpin wanita menunjukkan bahwa pemimpin wanita juga patut bersaing di ranah politik, dan membuktikan bahwa pemimpin wanita memiliki rasional yang sama dengan pemimpin laki-laki. Sehingga tidak ada yang perlu di khawatirkan oleh masyarakat untuk memilih wanita sebagai pemimpin daerah dan menepis anggapan bahwa wanita hanya terfokus pada urusan rumah tangga namun memberikan bukti bahwa wanita mampu mengambil keputusan dan kebijakan terkait alokasi anggaran yang sama dengan laki-laki. Perbedaan hanya terletak pada penggunaan realisasi anggaran. Dimana dijelaskan bahwa pengaruh yang tidak begitu besar pada realisasi anggaran disebabkan oleh adanya kondisi yang berbeda pada saat periode kepemimpinan berlangsung.

#### **Saran**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh pemimpin perempuan terhadap anggaran belanja daerah, maka dengan segala keterbatasan penulis dapat merekomendasikan kebijakan bahwa perlu adanya publikasi yang menyatakan bahwa wanita juga memiliki kapasitas yang setara dengan pria. Dengan demikian wanita dapat lebih berpartisipasi dalam politik dan masyarakat tidak ragu untuk memilih wanita sebagai pemimpin daerah. Selain ini hal ini akan mendorong tercapainya 30% kedudukan wanita baik di kursi parlemen.

Rekomendasi selanjutnya dapat dilakukan terhadap anggaran daerah. Selain telah diberlakukannya UUD 1945 pasal 31 ayat 4 dan UU Nomor 36 tahun 2019, perlu adanya peraturan daerah yang mengatur besarnya persentase minimum anggaran yang digunakan di daerah dalam menjalankan program kerja terlebih bagi daerah dengan nilai rata rata pertumbuhan sosial, pendidikan dan kesehatan di bawah standar nasional.

Seperti meningkatkan standar persentase minimum anggaran kesehatan bagi wilayah yang memiliki banyak masalah kesehatan.

Dalam hal penelitian, perlu untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh wanita terhadap anggaran belanja daerah. Terutama untuk dilakukan penelitian yang lebih spesifik terhadap penggunaan dari masing-masing fungsi anggaran tersebut sehingga hasil penelitian dapat memiliki hasil yang lebih baik. Selain itu perlu menambahkan adanya variabel lainnya yang belum mampu penulis dapatkan seperti kondisi wilayah, latar etnis maupun faktor eksternal lainnya agar penelitian yang dihasilkan dikemudian hari dapat memiliki hasil yang lebih optimal. Penelitian lebih lanjut mengenai hal serupa juga akan menambah literatur bagi pembaca sehingga dapat digunakan sebagai tolak ukur kontribusi dari adanya wanita dalam kursi pemerintahan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Afgani, K. F., Rivanda, A. K., Purbayati, R. (2021). *Predicting Corporate Bankruptcy: Based on Mda Textile and Garment on Indonesia Stock Exchange*. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 5(2), 1918–1932
- Ajija, Shochrul Rohmatul, Wulan Sari, D., Setianto, R., & Primanthi, M. (2010). *Cara Cerdas Menguasai Eviews*.
- Cerrato, J., & Cifre, E. (2018). Gender Inequality in Household Chores and Work-Family Conflict. *Frontiers in Psychology*, 9. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.01330>
- Chattopadhyay, R., & Duflo, E. (2004). *Women as Policy Makers: Evidence from a Randomized Policy Experiment in India* (Vol. 72, Issue 5).
- Clots-Figueras, I. (2011). Women in politics. Evidence from the Indian States. *Journal of Public Economics*, 95(7–8), 664–690. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2010.11.017>
- Funk, K. D., & Philips, A. Q. (2018). Representative Budgeting: Women Mayors and the Composition of Spending in Local Governments. *Political Research Quarterly*, 72(1), 19–33. <https://doi.org/10.1177/1065912918775237>
- Holman, M. R. (2014). Sex and the City: Female Leaders and Spending on Social Welfare Programs in U.S. Municipalities. *Journal of Urban Affairs*, 26(4), 701–715.
- Kemendagri. (2020). *Monitoring Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi*. Kementerian Dalam Negeri. <https://aksi.bangda.kemendagri.go.id/emonev/DashPrev/index/2>
- Kemkes. (2019). *Profil Kesehatan Indonesia tahun 2019*. Kementerian Kesehatan. <https://pusdatin.kemkes.go.id/resources/download/pusdatin/profil-kesehatan-indonesia/Profil-Kesehatan-indonesia-2019.pdf>
- KemenkoPMK. (2019). *Optimalisasi Peran Perempuan Dalam Pembangunan*. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan R1. <https://www.kemenkopmk.go.id/optimalisasi-peran-perempuan-dalam-pembangunan>

- Larengkum, D. (2012). Pengaruh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Berkala Efisiensi*, 62–72.
- Little, T. H., Dunn, D., & Deen, R. (2001). A View from the Top: Gender Differences in Legislative Priorities among State Legislative Leaders. *Women & Politics*, 22(4), 29–50.
- Rahayu, R. (2014). *Keberhasilan dan Hambatan Keterwakilan Perempuan di Asia Tenggara*.
- Rivanda, A. K., Muslim, A. I., (2021). Analisis Perbandingan Model Prediksi Finansial Distress pada Sub Sektor Textile dan Garment. *Jurnal Riset dan Akuntansi* 9(3), 485–500. <https://doi.org/10.17509/jrak.v9i3.32450>.
- Rivanda, A K; Arif, I A I; Ramadhan, R. (2022). *PENGARUH BI RATE DAN INFLASI TERHADAP IHSG DENGAN JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA ( Manajemen , Ekonomi , dan Akuntansi )*. 6(2), 1828–1841.
- Sasmita, J., & As'ad Raihan, S. (2017). *Proceeding Of The 6 Th NCFB And Doctoral Colloquium Towards A New Indonesia Business Architecture "Strategic Leadership: A Necessity for Prosperity and Sustainability" Fakultas Bisnis Dan Pascasarjana Unika Widya Mandala Surabaya Kepemimpinan Pria Dan Wanita*.
- Suci, B. K., Yamada, K., & Wibowo, K. (2020). *Does Female Politician Affect Policy Outcomes in Indonesia?*
- Svaleryd, H. (2009). Women's representation and public spending. *European Journal of Political Economy*, 25(2), 186–198. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2008.12.004>
- Vinky, E. A. (2020). *Does local female leader affect welfare spending in indonesia municipalities?* Universitas Indonesia.

### GAMBAR, GRAFIK DAN TABEL

Tabel 1. Descriptive Statistics

Variabel	Obs	Mean	Min	Max
Female (wanita =1; pria=0)	4112	0.113	0	1
Age (usia pemimpin"th")	4112	53.118	25	79
Luas (1000 km <sup>2</sup> )	4112	4.152	0.01	90.35
Ln Populasi (jiwa)	4112	12.474	0	15.62
PDRB (Miliar Rupiah)	4112	25667.94	0	701980
Kemiskinan (%)	4112	12.782	0	47.52
Female x twoperiods (1=2 periode; 0=lainnya)	4112	0.031	0	1
Alokasi Sosial (% anggaran)	4112	1.556	0	13

Realisasi Sosial (% anggaran)	4112	1.596	0	13.11
Alokasi Pendidikan (% anggaran)	4112	27.182	0	74
Realisasi Pendidikan (% anggaran)	4112	26.283	0	52.76
Alokasi Kesehatan (% anggaran)	4112	13.473	0	47
Realisasi Kesehatan (% anggaran)	4112	14.27	0	44.52

Sumber : DJPK; BPS;KPU, diolah, 2022

Tabel 2. Hasil Estimasi Model Dasar

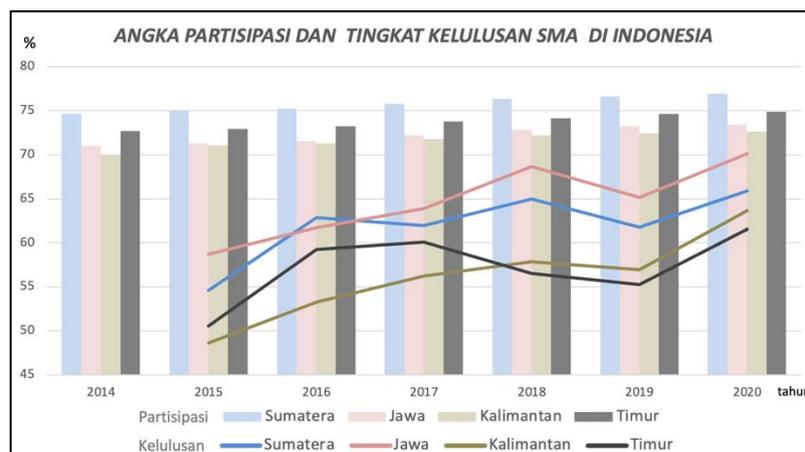
	Anggaran Sosial			Anggaran Pendidikan			Anggaran Kesehatan		
	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
<b>Alokasi Anggaran</b>									
<i>Female</i>	-0.117*	- 0.113 *	- 0.113	0.065 1	0.03 72	- 0.29 8	0.219	0.226	0.227
<i>(gender Pr=1 Lk=0)</i>	(0.0661 )	(0.06 61)	(0.07 52)	(0.714 )	(0.7 13)	(0.8 11)	0.219	0.226	0.227
<i>R-Square</i>	0.105	0.107	0.107	0.231	0.23 5	0.23 5	0.0535	0.0545	0.0558
<b>Realisasi Anggaran</b>									
<i>Female</i>	-0.0133	- 0.014 4	- 0.004 04	-0.223	0.22 3	0.00 671	0.560* **	0.573* **	0.405* *
<i>(gender Pr=1 Lk=0)</i>	(0.0371 )	(0.03 71)	(0.04 22)	(0.25)	(0.2 49)	(0.2 84)	(0.156)	(0.156)	(0.177)
<i>R-Square</i>	0.0452	0.051	0.051 7	0.219	0.22 6	0.22 7	0.471	0.474	0.474
<b>Control:</b>									
Kemiskinan, Lnpopulasi, PDRB, luas	No	Yes	Yes	No	Yes	Yes	No	Yes	Yes
<b>Control:</b>									
Kemiskinan, Lnpopulasi, PDRB, luas, Second periode, age	No	No	Yes	No	No	Yes	No	No	Yes
<i>Time Fix Effect</i>	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
<i>Individual Fix Effect</i>	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
<i>Observation</i>	4112	4112	4112	4112	4112	411 2	4112	4112	4112

Note: Standard errors in parentheses \* p<0.1, \*\* p<0.05, \*\*\* p<0.001

Tabel 3. Pengaruh wanita di Berbagai Wilayah Indonesia

Variabel	Wilayah Sumatera			Wilayah Jawa			Wilayah Kalimantan			Wilayah Timur		
	Sos	Pend	Kes	Sos	Pend	Kes	Sos	Pend	Kes	Sos	Pend	Kes
<b>Alokasi Anggaran</b>												
<i>Female</i>	-	3.532	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.51
	0.162	*	1	0.00	2.422	0.57	0.20	1.641	0.455	0.17	1.419	0.4
(1=wanita; 0=pria)	(0.17 6)	(1.94 7)	(1.1 49)	(0.1 30)	(1.26 4)	(0.7 51)	(0.1 44)	(1.85 2)	(1.16 1)	(0.1 43)	(1.50 9)	(0.9 45)
<i>R-Square</i>	0.088	0.223	0.07	0.12	0.263	0.13	0.25	0.475	0.156	0.21	0.322	0.06
	8		92	00	0	20	8			3		0
<b>Realisasi Anggaran</b>												
<i>Female</i>	-	1.538	0.58	0.05	-	0.28	-	0.871	1.563	-	0.402	-
	0.070	**	3	1	1.072	4	0.13	0.871	***	0.00	0.402	0.01
(1=wanita; 0=pria)	(0.10 6)	(0.70 2)	(0.3 79)	(0.0 53)	(0.44 6)	(0.2 77)	(0.0 68)	(0.63 8)	(0.41 8)	(0.0 939)	(0.53 1)	(0.3 80)
<i>R-Square</i>	0.070	0.238	0.49	0.06	0.397	0.45	0.24	0.138	0.613	0.05	0.224	0.46
	9		9	46	0	00	5			45		3
<i>Control:</i> Kemiskinan, Lnpopulasi, PDRB, luas, Second periode, age Time Fix Effect Individual Fix Effect	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
<i>Observation</i>	1232	1232	123	952	952	952	448	448	448	148	1480	148
			2							0		0

catatan: *standard errors* di tulis dalam tanda kurung, tingkat signifikansi statistik: \*  $p < 0.1$ , \*\*  $p < 0.05$ , \*\*\*  $p < 0.001$ .



Gambar 1. Angka Partisipasi Sekolah dan Tingkat Kelulusan SMA di Indonesia  
Sumber: BPS, diolah, 2022